

INOVASI IPTEK DAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN SEBAGAI LANGKAH PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BREBES

Agus Redi Susanto

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes

Jalan Proklamasi No.77 Brebes 52211

agusredi@gmail.com

Jurnal Ultras

Volume 6 No. 2 (9 – 22)

Info Artikel:

Diterima: 05 Juni 2023

Disetujui: 05 Juni 2023

Kata Kunci: Science and Technology Innovation, Service Quality Improvement, Local Government Policy Making

Abstract. Science and technology is a solution that must be planned and implemented in order to be competitive for developing countries because they have the ability to innovate to become a strong, independent, respected country and produce quality human resources for the common good of the people. In this technology, the system plays an important role in creating innovation, especially in the field of science and technology, as well as in quality management of public services. Over time, globalization and rapid technological revolutions have developed, which pose very serious challenges to current governments and global and regional developments, affecting the social life of people and countries. modern, competent and honest public service quality. Implementing a globally competitive government requires analysis, productivity assessment, service quality improvement, as well as comprehensive, integrated, open and high quality science and technology policy planning and innovation.

Pendahuluan

Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat awam sulit untuk berpikir, sehingga membutuhkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah hub untuk semua elemen sumber daya manusia dan penerapannya, yang merupakan salah satu kunci era teknologi dan informasi. Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menguasai ilmu dan teknologi

mengkomunikasikan teknologi dan informasi kepada masyarakat agar penerima teknologi dan informasi tersebut dapat lebih memahami perkembangan zaman, dengan kata lain negara. paradigma, komunikasi informasi. lebih condong ke tengah "publik". bukannya "pusat pemerintahan" karena waktu mempengaruhi situasi (Gulo, 2021).

Mewujudkan bangsa Indonesia yang alami di abad 21 merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia. Hal ini dapat terwujud jika setiap warga negara Indonesia memiliki kemauan dan karakter yang kuat untuk meningkatkan keramahan warga. Abad ke-21 yang populer membawa serta

perubahan, yaitu perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang menyebabkan perubahan paradigma dalam pembelajaran yang ditandai dengan perubahan kurikulum, media dan teknologi. Media pendidikan yang baik menginterpretasikan konsep abstrak dengan cara yang mudah dipahami. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tidak lepas dari tuntutan pembelajaran abad 21, salah satu tuntutan pembelajaran abad 21 adalah integrasi teknologi sebagai alat pengajaran untuk perkembangan ketidakmampuan belajar. (Firmansyah, 2019). Pegawai Negeri Sipil (ASN) harus belajar menggunakan teknologi yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, belajar mengajar dapat meningkatkan berpikir kreatif, komunikasi yang efektif, produktivitas yang tinggi dan keterampilan mental. Pembelajaran abad 21 sebenarnya merupakan hasil perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Masyarakat masyhur berkembang dari masyarakat primitif menjadi masyarakat agraris, kemudian menjadi masyarakat industri, dan sekarang berpindah ke masyarakat informasi. Masyarakat informasi ditandai dengan perkembangan digitalisasi. Dari tahun 1960-an hingga saat ini, penggunaan komputer, Internet, dan telepon seluler telah tumbuh secara eksponensial. Berdasarkan data WeAreSocial (Kemp, 2020) dibandingkan tahun 2019, jumlah pengguna media sosial per hari meningkat sebesar 49%, Indonesia berada di urutan keempat setelah Filipina-Kolombia-Brasil-Nigeria dengan waktu rata-rata 3 jam 26 menit, sedangkan rata-rata global adalah 2 jam 24 menit. Secara global, media sosial teratas yang digunakan di seluruh dunia adalah platform Facebook, diikuti oleh Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter, Pinterest, YouTube, Wechat, QQ, Qzone, Sina Weibo, Reddit. Masyarakat telah berubah dari komunitas offline menjadi komunitas online. Karena pesatnya perkembangan digitalisasi di masyarakat, suka atau tidak suka, pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia harus mengikuti perkembangan tersebut. Dapat

disimpulkan bahwa kita harus melek teknologi dan mampu menerapkan berbagai metode atau model pembelajaran berbasis TIK untuk mengikuti perkembangan digitalisasi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui implementasi inovasi pembelajaran abad 21 di Indonesia (Rahayu et al., 2022).

Ciri-ciri ASN di abad 21 adalah sebagai berikut: 1. ASN harus memiliki minat baca yang besar. 2. ASN harus memiliki kemampuan memahami dan menganalisa situasi terkini. Karena dalam tugasnya, ASN selalu berhadapan dengan tugas yang diberikan oleh pengawas yang berbeda. Beberapa tugas yang harus dilakukan ASN antara lain meninjau regulasi, kebijakan, dan pedoman. Semua itu menuntut ASN untuk bisa menganalisa order. 3. ASN harus kreatif dan inovatif dalam mengamalkan model kerja yang disetujui. Tuntutan pembelajaran abad 21 menuntut ASN yang kreatif dan inovatif untuk mempraktikkan model pembelajaran yang dapat mengandalkan bimbingan instruktur. Menggabungkan model pembelajaran dan penggunaan teknologi digital mengarah pada kreativitas dan inovasi pada manajer. ASN mampu melakukan perubahan budaya. Pandangan budaya belajar yang “berorientasi sosial” saat ini harus dapat diubah menjadi “berorientasi publik”. Mengubah audiens menjadi pengalaman belajar yang dapat mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan secara optimal (Hefniy & Fairus, 2019). Selain itu, terdapat pula ciri-ciri masyarakat abad 21 yaitu:

1. Berpikir kritis, memiliki kemauan dan kemampuan memecahkan masalah dan berkomunikasi, kreatif, kolaboratif dan inovatif.
2. Anda memiliki kemauan dan kemampuan untuk menjadi digital, media baru dan melek TIK.
3. Inisiatif yang fleksibel dan dapat disesuaikan.

Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi semakin melampaui pemahaman orang awam, sehingga diperlukan adanya pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat meneruskan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selama ini. Lembaga pendidikan formal,

nonformal, dan informal sebagai sarana produksi sumber daya manusia dengan segala unsur yang berlaku merupakan salah satu kunci era teknologi dan informasi. Selain itu, ASN harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menganalisis permasalahan dengan publik, sehingga ASN akan lebih berperan dalam proses analisis (Riset & Tinggi, 2018).

Tinjauan Pustaka

I. Inovasi IPTEK

Kita sedang memasuki era baru dalam dunia pendidikan, baik nasional maupun internasional, dimana negara-negara berkembang memegang peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, khususnya dalam topik pembahasan di bidang hukum ini misalnya menemukan hal-hal baru. keluarga hukum menurut penulis yaitu: ada dua budaya keilmuan yang harus diterapkan dalam pengembangan bidang hukum di setiap perguruan tinggi untuk pengembangan lebih lanjut, mengangkat visi dan sekaligus kualitas pendidikan dan kualitas. pengetahuan bagi generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi misalnya: (Riset & Tinggi, 2018)

1) Ilmu pengetahuan alam (natural science) mengacu pada sekumpulan pengetahuan, kaidah dan hukum yang bersifat pasti dan universal (universal), berlaku di kapanpun dan dimanapun, karena dalam ilmu fikih yang dipelajari dan diatur sebagian adalah alam dan manusia. "Ilmu alam adalah tubuh pengetahuan, cara-cara memperoleh dan/atau menggunakan pengetahuan itu". Membuat pengamatan eksperimental, kesimpulan ilmiah, penemuan ilmiah dan teori dari berbagai kumpulan data dalam pengaturan alam dan gerak manusia, sebagai contoh pertama: penelitian harus berbasis ilmiah, karena yang kita inginkan dan ingin kita pelajari adalah aturan, hukum dan peraturan, perilaku manusia (kehidupan) dan contoh lain seperti:

dalam perumusan teori, teks hukum, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan keadaan alam/lingkungan/daerah dan orang, menurut penulis, maksud dan tujuan utama ilmu hukum tidak ada ; kecuali tiga aspek, yaitu: keadilan; kebijaksanaan; dan kepastian. Dengan demikian menurut hemat penulis pada tahap ini wajib dilakukan penelitian di bidang hukum orisinalitas, teori, review naskah dan peer review, dan kualitas eksekusi, delivery to quality, tujuan ilmu pengetahuan, masa depan (Riset & Tinggi, 2018).

2) Kemanusiaan (artes liberali) adalah kemanusiaan yang berkaitan dengan etika, logika, pendidikan Pancasila dan nilai-nilai kewarganegaraan, estetika, moralitas, agama, kualitas dan sifat manusia. itu bertujuan untuk membentuk sifat manusia dengan cara yang lebih manusiawi. Kelebihan penjelasan ini adalah masuknya nilai-nilai budaya manusia dan nilai-nilai universal, karena tanpa integrasi humaniora ke dalam undang-undang, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi hampa dan tidak berguna (Riset & Tinggi, 2018).

Dua hal yang disebutkan di atas oleh penulis, ilmu fikih menurutnya bukan hanya hasil penalaran alam, tetapi juga hasil dari keadaan sejarah yang erat kaitannya dengan keadaan nyata dan manusia. narasumber yang memperdalam ilmu dari berbagai departemen dalam pembahasan ini, khususnya di bidang hukum. Di mana setiap perguruan tinggi harus sejak dini memperkenalkan bahkan menawarkan satu mata kuliah di setiap program pendidikan hukum, misalnya (Cyber Law, Cyber Law, UU Literasi Digital dan Teknologi, UU Pendidikan Informasi dan Komunikasi) yang berhubungan dengan berbagai topik. masalah dan pelanggaran (Nurfurqon, 2020). Perkembangan dalam dunia teknologi, selain untuk memperoleh

ilmu pengetahuan, tujuan penulis adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berwawasan ke depan, mempelajari hukum teknologi, informasi dan komunikasi, agar masyarakat dapat Keadilan dan hukuman bagi pelaku kejahatan harus dihormati, ini Perannya harus selalu dihormati, membutuhkan pengetahuan hukum, penelitian ilmiah pragmatis, yang telah menjadi kualitas pendidikan lanjutan dan ukuran kualitas sumber daya manusia dengan arah yang sangat jelas. ke arah perkembangan ilmu pengetahuan modern, karena menurut penulis Hukum semakin mahir dalam kemajuan dan perkembangan. Karena selain kedua poin yang penulis uraikan di atas, berkaitan dengan pembelajaran sains dan teori, khususnya menjawab dan menghadapi sains dan teknologi saat ini yang setiap hari mengalami perubahan, kemajuan dan kompleksitas. dikejutkan oleh percepatan perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai belahan dunia (Gulo, 2021).

Sistem pendidikan negara merupakan salah satu pilar pertumbuhan daya saing nasional dan internasional. Sistem pendidikan harus menjamin sumber daya manusia yang modern, cakap, jujur, beradab, bermoral dan beradab di bawah bimbingan ilmu pengetahuan dan teknologi inovatif, yang merupakan salah satu komponen ekosistem inovatif (A'yunin et al., 2022). Ini mendiversifikasi interaksi antara ekosistem pendidikan dan inovasi dan menempatkan sumber daya manusia di pusat pertumbuhan, pengembangan dan inovasi, peningkatan berkelanjutan dan investasi masa depan di setiap negara. Menurut pendidikan hukum, "hukum dan ketertiban" adalah bagian integral dari semua lembaga dan organisasi (pemerintah, swasta, industri, pendidikan, dan organisasi lainnya) dengan peraturan, standar, dan manusia yang dirancang dengan baik. sumber daya dapat memberikan sinyal yang kuat dalam mendukung dan/atau

memimpin kegiatan inovatif, disini tujuan penulis adalah menekankan pada dua poin yang dijelaskan pada poin di atas, bahwa keterampilan adalah pusat pengembangan kurikulum hukum (Watts, 2018). Keterampilan keilmuan dan teknologi, kompetensi dan kepemimpinan merupakan kunci terpenting yang harus dikuasai oleh setiap orang dan khususnya (ASN, dosen, mahasiswa, praktisi). Kategori sumber daya terakhir yang paling penting untuk keberhasilan organisasi mana pun (publik, swasta, kelembagaan, dan lainnya) terutama adalah sumber daya manusia, termasuk tenaga kerja, manajemen, dan pengetahuan. Namun, kemampuan gerakan untuk memobilisasi sumber daya manusia dibatasi oleh waktu dan keterampilan yang tersedia bagi para anggotanya (Andrias, P. K; & Sachs, BI, 2021). Pengembangan dan implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi akan selalu dipimpin oleh pemimpin dunia yang berbeda dengan rencana aksi dan model serta prinsip kontrak yang berbeda. Melalui inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendunia dan di tingkat ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), dapat memberikan manfaat baik secara lokal maupun global, membuka akses masyarakat, pendidikan serta mutu dan kualitas kemanusiaan. sumber daya dan sumber daya alam, kontribusi terhadap sistem teknologi informasi dan komunikasi berbasis pengetahuan. Masa depan bangsa, negara dan dunia ada di tangan pemuda saat ini dan mereka harus melek ilmiah dan kompeten secara teknis, berharap untuk kemakmuran dan pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan. Dibekali dengan kreativitas, semangat, kualitas, pendidikan iptek dan kualitas pendidikan untuk generasi muda, membuka jalan bagi masyarakat luas di tingkat nasional dan global untuk peningkatan kapasitas dan pembelajaran seumur hidup. di masa depan. Ini membutuhkan ekosistem inovatif di

setiap sekolah, lembaga pendidikan dan profesional, universitas, dan mekanisme yang menghubungkan sistem pendidikan dengan pekerjaan dan karier (Fitria, 2021). Bidang teknologi pendidikan merupakan bidang penelitian ilmiah terapan yang spektrumnya cukup luas. Pemahaman yang benar tentang teknologi tidak hanya tentang kompleksitas perangkat keras produk di industri elektronik. Teknologi, bila diterapkan dalam konteks pendidikan sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial, bermakna sebagai proses pengolahan informasi pendidikan yang harus disikapi untuk menemukan solusi masalah pendidikan. Proses pemecahan masalah yang teruji secara empiris melalui diskusi dan pemikiran yang intensif identik dengan proses bahan baku di perusahaan manufaktur produk teknologi. Inilah persamaan makna teknologi dalam konteks teknologi dalam konteks pendidikan. Salah satu faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah penggunaan strategi yang tepat, namun memilih strategi yang tepat tidaklah mudah. Memilih strategi khusus untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu dari perubahan sosial itu sulit karena, pada kenyataannya, strategi yang berbeda terus-menerus berada pada tingkat kendala eksternal yang paling lemah (Taufiqurokhman, 2016).

2. Mutu Pelayanan

Pelayanan publik masih menjadi masalah dalam birokrasi di Indonesia, banyak faktor dan variasi yang menyebabkan masalah ini dari perspektif masyarakat. Kebutuhan masyarakat saat ini umumnya besar dan keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan akurat. Setelah mendapat kepercayaan dari rakyat, kini pemerintah memiliki tanggung jawab penting untuk menjawab keinginan dan kebutuhan rakyat dengan memberikan pelayanan publik tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, golongan, ras dan lain-lain

(Ulumiyah, 2018). Kelancaran pelaksanaan pembangunan aparatur sipil negara tergantung pada kesempurnaan aparatur negara dan kualitas aparatur negara. Dengan demikian, Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu pemain terpenting dalam pelaksanaan pembangunan pelayanan. Berdasarkan UUD 1945, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur segala urusan negara. Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes merupakan organisasi nirlaba yang merupakan penyedia layanan publik daerah yang menangani segala urusan bidang pendidikan. Tugas pokok bidang kepegawaian adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tugas pelayanan kepegawaian dinas diklat Brebes. Tergantung pada manajemen, staf, dan fasilitas, layanan dapat dikatakan berkualitas tinggi. Dalam prakteknya, masyarakat hanya menginginkan prosedur yang sederhana, mudah dan memakan waktu. Salah satu tugas terpenting sejauh ini adalah meningkatkan layanan. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan publik, solusi yang tepat adalah penerapan manajemen strategis, yang harus memandu dan mengarahkan perubahan kondisi yang tersedia bagi penyedia layanan. Dengan cara ini ia dapat menganalisis semua keunggulan organisasi, semua kelemahan, semua ancaman yang melemahkan citra organisasi dan semua peluang yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas layanan. Oleh karena itu, manajemen strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan khususnya pada bagian organisasi, dan diketahui pula bahwa pencapaian kualitas pelayanan publik manajemen strategis telah dilakukan dari sisi organisasi. . di daerah Brebes. Manajemen strategis sebagai kerangka kerja untuk memecahkan masalah organisasi, terutama yang berkaitan

dengan persaingan. Semua elemen organisasi didorong untuk berpikir kreatif. Manfaat penerapan manajemen strategis adalah (Taufiqurokhman, 2016):

- a. Memberikan organisasi arah yang jelas dan transparan serta tujuan jangka panjang.
- b. Membantu manajer menerapkan perubahan dan strategi untuk meningkatkan kapasitas organisasi untuk mencegah masalah di masa depan.
- c. Meningkatkan operasi organisasi dan meningkatkan penggunaan sumber daya.
- d. Mengidentifikasi keunggulan komparatif yang berbeda dalam pengaturan organisasi.
- e) Melibatkan anggota dalam mengembangkan strategi sehingga anggota organisasi termotivasi untuk menerapkannya.
- f. Pengurangan fungsi atau fungsi yang tumpang tindih dalam setiap unit organisasi.

Kualitas pelayanan sesuai dengan standar keberhasilan yang dapat dicapai. Ada dua faktor dalam menganalisis kualitas layanan, yaitu efektivitas layanan dan harapan layanan pelanggan. Agar penerima layanan meninggalkan kesan yang baik dan puas dengan kualitas layanan yang diterima, penyedia layanan harus mengetahui harapan mereka. Sehingga tidak ada kesenjangan antara pelayanan yang ditawarkan dengan harapan penerima pelayanan (Hefniy & Fairus, 2019). Dimensi kualitas pelayanan tercermin dalam lima dimensi utama, yaitu:

- a. Bukti langsung (tangible) berupa fasilitas fisik, peralatan, personel dan komunikasi.
- b. Keamanan kerja, mis. Penyedia jasa mampu memberikan pelayanan dengan cepat, tepat dan memuaskan.
- c. Responsiveness melibatkan kesediaan penyedia layanan untuk membantu dan menanggapi pengguna layanan.
- d. Jaminan (Guarantee), meliputi pengetahuan, keahlian dan

kehandalan penyedia jasa, tanpa resiko atau keragu-raguan. e) Empati meliputi kemudahan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan kesadaran akan kebutuhan pengguna jasa (Taufiqurokhman, 2016).

Pada dasarnya ada tiga langkah utama untuk menentukan baik atau buruknya kualitas pelayanan dengan mempertimbangkan keseimbangannya.

- a. komponen interpersonal yang dilaksanakan (Inter Personal Component);
- b. komponen proses dengan lingkungan yang efektif (proses dan lingkungan);
- c. Komponen profesional dengan sistem bekas (profesional dan teknis)

Menurut Edward Deming (1940), kualitas adalah pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan, menurut Joseph M. Juran (1954), kualitas adalah kesesuaian penggunaan suatu produk untuk mencapai kepuasan pelanggan. Sementara itu, ikutilah (Hartaka & Made, 2021). Kualitas adalah ciri umum dan gambaran suatu barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas adalah sesuatu yang menjamin tujuan atau hasil yang diharapkan, dan kualitas harus selalu dibarengi dengan pengembangan profesional terkini untuk menjamin kepuasan pelanggan. Peningkatan kualitas mengukur tingkat kesempurnaan pelayanan melalui perbaikan yang sistematis dan berkesinambungan dengan standar atau prinsip untuk mencapai kualitas pelayanan yang optimal atau prima sesuai dengan standar ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan sumber daya yang tersedia (Hartaka & Made, 2021).

Kualitas pelayanan publik tidak lepas dari kepuasan pelanggan atau masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas dapat meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Selain itu, kepuasan

pelanggan dapat dijadikan ukuran keberhasilan kualitas real estate publik. Kepuasan pelanggan terjadi ketika pencapaian lebih besar dari yang diharapkan. Sejalan dengan pesatnya perkembangan dunia teknologi, teknologi informasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan layanan mediasi, salah satunya layanan mediasi informasi, agar pelanggan dapat memperoleh layanan yang baik dan tepat sasaran. Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling terkait yang didefinisikan secara teknis yang mengumpulkan (atau mengambil), memproses, menyimpan, dan berbagi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kontrol dalam suatu organisasi (Salam & Sutaryo, 2019).

3. Kebijakan Pemerintah

Konsep good governance mulai dikenal luas setelah masa reformasi. Tata pemerintahan yang baik adalah praktik terbaik dari administrasi publik. Agar good governance dapat terwujud dan berfungsi sebagaimana mestinya, diperlukan komitmen dan partisipasi semua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif membutuhkan keselarasan (koordinasi) yang baik dan kejujuran, profesionalisme, etos kerja dan semangat kerja yang tinggi. Asas pemerintahan yang baik adalah asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas profesionalisme, dan asas tanggung jawab. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan syarat terpenting bagi terwujudnya keinginan rakyat serta tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata perlu segera dikembangkan dan dilaksanakan agar pengelolaan dan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab serta tanpa KKN (Fauzi, 2019). Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah harus memiliki keterkaitan dengan mekanisme pelaporan dan upaya penguatan peran dan kapasitas

parlemen serta menjamin pemerataan akses informasi bagi masyarakat luas. Parameter penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good local governance) melayani masyarakat dan memberdayakan warga dalam pembangunan. Mewujudkan kotamadya yang baik dan berfungsi memerlukan komitmen dan partisipasi aktif dari pemerintah kota dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin daerah yang kompeten, kreatif, tanggap, jujur, amanah, demokratis dan berprinsip, serta kearifan lokal dalam menjalankan pemerintahan daerah. Dengan demikian roda pemerintahan daerah yang berpedoman pada prinsip otonomi seluas-luasnya dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bertanggung jawab (Fauzi, 2019).

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang terdiri dari:

- a. Keamanan hak-hak dasar
- b. Peraturan dasar pengelolaan lahan
- c. Dasar kepentingan umum
- d. Prinsip transparansi
- e. Prinsip proporsionalitas
- f. Asas profesionalisme
- g. Prinsip tanggung jawab
- h. Prinsip efisiensi dan
- j. Prinsip keadilan.

(Abdul Wahab, 2012) mengatakan bahwa "Politik, apapun ruang lingkupnya, benar-benar merupakan aktivitas terstruktur yang mengarah pada tujuan tertentu yang disepakati, bukan sekadar keputusan acak untuk melakukan sesuatu". Sementara itu (Ismail Nawawi, 2009) menyatakan bahwa "kebijakan adalah prinsip atau prosedur yang dipilih untuk memandu pengambilan keputusan". Easton, sebaliknya, menyebut kebijakan pemerintah sebagai "kemampuan untuk mendistribusikan nilai kepada masyarakat secara keseluruhan". Pengertian politik menurut Anderson (Winarno, 2012) menjelaskan sebagai berikut: "politik adalah serangkaian

tindakan yang bertujuan untuk mengatasi suatu masalah atau masalah yang ditimbulkan oleh satu atau lebih aktor". kepentingan masyarakat umum, masyarakat atau negara. Dalam istilah kebijakan publik banyak pendapat yang menawarkan pengertian yang berbeda-beda, namun istilah tersebut memberikan pengertian tentang kebijakan publik. Konsep ini sebenarnya memberikan penjelasan tentang kedalaman analisis untuk mengkristalkan batas-batas konsep tatanan umum. Dalam karya ini, penulis menganalisis pendapat para ahli tentang konsep ketertiban umum, termasuk Robert Eyestone (dalam Winarno, 2012: 17), yang menurutnya kebijakan publik secara umum dapat diartikan sebagai hubungan antar negara, masyarakat dan negara. kondisi lingkungan. Selain itu, Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan (Islamy, 2009:15-16) menawarkan konsep kearifan sebagai "program yang terencana dari tujuan, nilai, dan praktik" (goals, values, and guidance practice to achievement the program). Pernyataan di atas menegaskan bahwa politik adalah program dengan tujuan yang dapat dicapai. Kemudian (Nugroho, 2012) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah: "cara mencapai tujuan yang kita perjuangkan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan) dan Undang-Undang Dasar 1945 (penyatuan negara Republik Indonesia berdasarkan hukum, bukan hanya kekuasaan) ketertiban umum adalah segala prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan. memiliki atau mengandung tujuan atau maksud, yang hendak dicapai atau dicapai seseorang. Secara umum Menurut W.I. Jenkins (Abdul Wahab, 2012), politik adalah kebijakan publik: "seperangkat keputusan yang berkaitan dengan pol. seorang aktor atau kelompok melakukan ini dalam situasi tertentu, di

mana keputusan ini pada prinsipnya harus menentukan. pencapaian aktor' (urutan keputusan terkait oleh aktor politik atau sekelompok aktor politik tentang tujuan yang dipilih dan cara untuk mencapainya dalam situasi di mana keputusan masih berada di tangan aktor). Ketua J.O. Udoji mengambil sedikit berbeda. pandangan dari penyerang W.I. Jenkins, Ketua J.O. Udoji lebih menekankan pada kebijakan publik untuk mencapai tujuan tertentu dan mempengaruhi masyarakat.

Manajer ketertiban umum J.O. Udoji (Whabi, 2012: 5) adalah sebagai berikut "tindakan yang diterima diarahkan terhadap masalah tertentu atau kelompok masalah terkait yang mempengaruhi masyarakat secara umum" (diterima tindakan yang mengarah ke tujuan tertentu terkait dengan sesuatu yang lain yang mempengaruhi sejumlah besar anggota komunitas). Berdasarkan pengertian para peneliti kebijakan publik di atas, dapat dijelaskan bagaimana kebijakan publik memiliki dimensi yang luas dan sangat dinamis, sehingga dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut, dan kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai seperangkat keputusan atau tindakan yang dipaksakan. negara. pemerintah . yang langkah-langkahnya terkait satu sama lain dan dengan tujuan yang dapat dicapai. Dalam penelitian ini, penulis juga mengutip pendapat Anderson (Islamy, 2009: 17) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dan diikuti serta dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor untuk memecahkan suatu masalah. masalah. Dari sudut pandang Anderson dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan pasti memiliki tujuan tertentu untuk memecahkan suatu masalah tertentu, dan tujuan tersebut dapat dicapai jika kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik. Ada tiga bentuk utama analisis politik (Dunn 2000), yaitu analisis prospektif, retrospektif, dan

terintegrasi. Analisis prospektif adalah analisis produksi dan transformasi pengetahuan sebelum inisiatif dan implementasi kebijakan, analisis retrospektif adalah produksi dan transformasi pengetahuan setelah inisiatif dan implementasi kebijakan, sedangkan analisis terpadu adalah bentuk analisis kombinasi gaya. memperhatikan aktivitas aktor dalam penciptaan dan transformasi pengetahuan sebelum dan sesudah implementasi kebijakan, sehingga analisis kebijakan yang terintegrasi dapat dikatakan sebagai gabungan dari kedua analisis tersebut.

Metoda Analisa

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode hukum normatif, yang menitikberatkan pada kajian asas, norma dan penerapan yurisprudensi positif. Penelitian dan pengembangan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan hukum, kebijakan pemerintah, buku referensi, pendekatan sejarah, petunjuk teknis, workshop, webinar, jurnal nasional dan internasional, majalah, surat kabar dan peraturan instansi sejenis yang berjudul "Inovasi Iptek, Peningkatan Pelayanan". Kualitas". "Dan sebagai langkah adopsi pemerintah daerah Kabupaten Brebes" untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan penulis, bahan-bahan yang diperoleh penulis diinventarisasi dan diputuskan untuk digunakan sebagai bahan. analisis pokok bahasan dan pengembangan materi kebaikan (tingkat dasar, menengah dan ketiga) di bidang hukum. Hal ini dilakukan dan disusun berdasarkan format, jenis dan tingkatan untuk memudahkan penanganan data (Gulo, 2021).

Metode penjelasan yang mengkaji masalah sosial dan penggunaannya dalam masyarakat sehari-hari dan situasi khusus. Tujuan dari penulisan deskripsi ini adalah untuk mencari pemecahan masalah dengan menjelaskan atau menjelaskan secara sistematis, faktual dan jelas fakta, ciri-ciri dan hubungan antar peristiwa. Setelah

analisis, struktur masalah, tujuan makalah, dan pembahasan diperjelas dan diintegrasikan melalui proses sintesis. Kemudian saya sampai pada kesimpulan bahwa konsensus umum adalah perubahan.

Hasil dan Pembahasan

I. Inovasi IPTEK

Literatur kebijakan berfokus pada faktor perspektif kebijakan publik, yang merupakan konsep dan prinsip di balik kerja, manajemen dan praktik (organisasi atau nasional), serta tujuan, cita-cita dan pedoman. mencapai tujuan. Kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah agar inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan yang bermutu, sumber daya manusia yang bermutu dan maju, modern, kompeten dan jujur tampil efektif dan handal di dunia. persaingan di bidang pendidikan khususnya di bidang hukum, baik di dalam negeri maupun internasional. Tujuan politik dari debat ini adalah agar sains dan teknologi mentransfer pengetahuan, pemahaman, pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari budaya industri pusat untuk mempromosikan kualitas dan daya saing kualitas (L.A.N, 2015). Dalam demokrasi harus mampu menyediakan dan memberdayakan warganya untuk mengungkapkan berbagai kepentingannya secara efektif dan kemudian didengarkan oleh wakilnya (pemerintah) sehingga implementasi kebijakan disetujui. orang-orang dengan keahlian yang berbeda dalam kebijakan publik. : (a) Penting, yaitu, dalam kaitannya dengan pendekatan analisis empiris, mempertanyakan fakta adalah hasil politik; (b) evaluatif, yaitu. terkait dengan evaluasi analisis kebijakan, yang menanyakan apakah kebijakan siap digunakan dan diimplementasikan; dan (c) advokasi, yaitu pendekatan normatif terhadap analisis politik dan mempertanyakan tindakan politik.

Sebagai generasi baru dalam perkembangan ilmu analisis politik,

semua keputusan pemerintah didasarkan pada dokumen dan data empiris untuk memastikan efektivitas pemerintahannya, yang tugas utamanya adalah ilmuwan politik dilatih untuk menciptakan profesionalisme (politik, sains, hukum, manajemen, ekonomi dan lain-lain) (Riset & Tinggi, 2018). Percepatan pembangunan negara ke tingkat yang baru merupakan langkah mewujudkan visi Indonesia 2045. Revolusi Industri 4.0 telah direspon baik oleh pemerintah Indonesia dengan beberapa kebijakan yang difokuskan untuk meningkatkan daya saing negara dalam persaingan global. Dengan memperluas peran iptek, bangsa Indonesia akan meningkatkan produktivitas dan secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Inti dari strategi pemerintah Indonesia adalah beberapa isu yang ditujukan untuk meningkatkan peran iptek dan inovasi dalam pembangunan negara, pertumbuhan dan produktivitas ekonomi, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan dan inovasi iptek di Asia dan dunia. , yaitu: (1) Inisiatif Inovasi dan Sistem Iptek Nasional untuk Membangun Fondasi; (2) peningkatan kapasitas staf lembaga iptek dan taman kanak-kanak; (3) pengembangan teknologi berdasarkan peluang wilayah dan budaya; (4) mengembangkan penelitian sosial-humanistik untuk mendukung inovasi dan produktivitas masyarakat. Di antara beberapa poin strategis di atas, sistem iptek dan inovasi nasional merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh negara berbasis iptek (Cerra & Morgan, 2022).

2. Mutu Pelayanan

Pekerjaan ASN untuk meningkatkan kualitas pelayanan Badan Pengurus Kabupaten Brebes meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan ASN harus memiliki fase go-to-government dimana fase perencanaan tersebut

dimana pimpinan staf mengumpulkan para pejabat dan staf untuk mengadakan rapat bersama untuk melaporkan pelayanan pemerintah yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan oleh Pemkab Brebes. . Implementasi mengacu pada peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu dengan berbagi di cabang masing-masing, setiap pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan benar dan bertanggung jawab kepada pemerintah agar berjalan dengan lancar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Hefniy & Fairus, 2019). Upaya pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kualitas pelayanan publik merupakan nilai tersendiri bagi OPD. Harus ada tahapan untuk mencapai kepemimpinan, dimana tahapan tersebut adalah tercapainya kualitas pelayanan publik. . Untuk menciptakan administrasi yang unggul diperlukan kualifikasi dan keterampilan yang mendukung bidang pelayanan publik, serta PNS dalam proses administrasi. Dalam kaitan ini, upaya ASN sangat penting untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelayanan publik. Terciptanya kualitas pelayanan yang baik tidak lepas dari peran pegawai, dalam hal ini kepuasan yang dialami pelanggan dapat menjadi penilaian terhadap kualitas negara tersebut. Dari kutipan *The Latest Strategy for Improving Service Quality*. Konsep dan implementasi pelayanan prima dimaknai

pelayanan terbaik dan memenuhi standar pelayanan dari sudut pandang pengguna, perspektif proses pelayanan dapat dicapai jika kualitas staf cukup profesional. Namun, LAN RI mendefinisikan pelayanan prima sebagai pelayanan terbaik dan melampaui, melampaui dan melampaui pelayanan yang diberikan oleh pihak lain atau pelayanan sebelumnya. Istilah *excellent service* sendiri merupakan terjemahan dari *excellent service*,

yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Persoalannya adalah apa yang dimaksud dengan pelayanan sangat baik atau pelayanan terbaik dalam konteks pelayanan publik atau negara. Lembaga pemeringkat regional memberikan kesan pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat berdasarkan standar kualitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga pelanggan dapat terpuaskan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap organisasi permesinan daerah atau nasional.

3. Kebijakan Pemerintah

Dalam hal ini, kebijakan didasarkan pada pemikiran bahwa mekanisme akuntabilitas yang ada dalam sistem demokrasi praktis memastikan pegawai negeri memastikan standar, kualitas pelayanan dan peraturan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan melalui kebijakan pemerintah, karena jika tidak, mereka akan menghadapi konsekuensi dari kegagalan pemerintah untuk mengelola negara. Dalam setiap kebijakan publik yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai kelompok, yaitu: politisi, pegawai negeri sipil, warga negara atau perwakilannya, berbagai gerakan sosial dan kelompok kepentingan, serta kelompok swasta lainnya. Proses penciptaannya, berdasarkan prioritas yang ditetapkan oleh badan untuk persetujuan tindakan dan aturan yang diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan berbagai peraturan, penyediaan dan penggunaan pelayanan publik untuk dan untuk Komunitas kebijakan "ketertiban umum" (Bjuremalm, H.; Gibaja, A.F.; Molleda, J.V, 2015).

Percepatan pembangunan nasional berbasis baru merupakan langkah mewujudkan visi Indonesia tahun 2045. Pemerintah Indonesia

telah merespon dengan baik adanya Revolusi Industri 4.0 dengan beberapa kebijakan yang difokuskan untuk menumbuhkan daya saing sumber daya negara dalam menghadapi persaingan global. Dengan memperluas peran iptek, bangsa Indonesia akan meningkatkan produktivitas dan secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Beberapa hal yang menjadi fokus pemerintah Indonesia dalam strategi peningkatan peran iptek dan inovasi dalam pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan produktivitas negara, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan iptek dan inovasi di negara ini Asia dan dunia. yaitu: (1) prakarsa inovasi dan sistem iptek nasional untuk menciptakan dana; (2) peningkatan kapasitas SDM lembaga dan taman kanak-kanak dalam bidang iptek; (3) pengembangan teknologi berdasarkan peluang wilayah dan budaya; (4) pengembangan kajian sosio-humanistik untuk mendukung inovasi dan produktivitas masyarakat. Di antara beberapa poin strategis di atas, sistem iptek dan inovasi nasional merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh negara berbasis iptek dan inovasi (Brodjonegoro, B. Prof, 2018)

Kebijakan nasional harus mendorong inovasi dalam teknologi baru dan berkembang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, sambil mengatasi dampak negatif dalam semua kasus, dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal atau terbelakang dalam hal efektivitas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah memiliki berbagai alat, a) dimulai dengan tindakan regulasi; b) alat untuk meningkatkan pendidikan, layanan dan pemerintahan yang baik; c) tingkat keterampilan dan pengetahuan; d) kualifikasi perguruan tinggi dan kualifikasi standar pendidikan; e) manajemen iptek dan

keterampilan digital; f) efektivitas dan peran perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas dan mutu lembaga pendidikan, pendidikan, jurusan dan kelompok studi yang semakin modern; g) sampai dengan pengaturan program pertukaran informasi di tingkat nasional, regional dan internasional. Dalam poin-poin tersebut di atas, dengan mendorong perubahan, pembuat kebijakan dapat memengaruhi arahnya dan mengurangi risiko meningkatnya ketimpangan di masyarakat. Pada saat yang sama, pengambil keputusan harus mengantisipasi dampaknya terhadap tenaga kerja. Untuk memanfaatkan sepenuhnya teknologi ini, dosen dan mahasiswa perguruan tinggi membutuhkan pengetahuan sains, humaniora, keterampilan, dan bisnis untuk dilatih atau dilatih ulang secara terus-menerus. mutu dan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Jika pertanyaan dan/atau poin di atas tercapai, maka dapat mendorong pembangunan negara serta dukungan komunitas internasional dalam mempromosikan dialog global tentang semua aspek perubahan teknologi yang cepat dan dampaknya terhadap masyarakat, termasuk etika dan normatif. ukuran Semua ini berarti memperluas kapasitas penilaian teknologi di tingkat nasional, regional dan internasional (Guterres, A., 2021)

Kesimpulan

Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi memperumit pemikiran masyarakat awam, sehingga diperlukan adanya pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Selain itu, Insinyur Sipil Negara (ASN) harus menguasai ilmu teknik dan telekomunikasi, serta informasi publik, sehingga penerima teknologi dan informasi tersebut dapat lebih memahami waktu, yaitu paradigma waktu itu negara dapat

disimpulkan bahwa kita harus melek teknologi dan mampu menerapkan berbagai metode atau model pembelajaran berbasis TIK untuk melanjutkan perkembangan digitalisasi. Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi semakin melampaui pemikiran orang awam, oleh karena itu diperlukan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat melanjutkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dan membuat kemajuan baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam perkembangannya teknologi. Selain itu, ASN harus menguasai iptek analisis masalah dengan publik, sehingga ASN lebih bermakna dalam proses analisisnya, yaitu paradigma masalah biasanya bersifat “publik” dan tidak lebih. Menurut Anderson dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan pasti memiliki tujuan tertentu untuk memecahkan suatu masalah tertentu, dan tujuan tersebut dapat dicapai jika kebijakan tersebut diimplementasikan dengan benar. Analisis prospektif adalah analisis pembangkitan dan transformasi pengetahuan sebelum inisiasi dan implementasi kebijakan, analisis retrospektif adalah pembangkitan dan transformasi pengetahuan setelah inisiasi dan implementasi kebijakan, sedangkan analisis terpadu adalah bentuk analisis yang mengandung gaya. tentang tindakan aktor, memperhatikan penciptaan dan transformasi pengetahuan sebelum dan sesudah tindakan politik, sehingga analisis politik yang terintegrasi dapat dikatakan sebagai gabungan dari kedua analisis tersebut. Ketentuan tersebut menjelaskan bentuk informasi yang tersedia untuk umum atau bentuk informasi rahasia, penerimaan informasi, batas waktu penerimaan informasi, dan tata cara banding jika informasi tersebut tidak sampai ke publik. Tujuan implementasi adalah pemahaman yang masuk akal dan implementasi rencana terstruktur. Salah satu upaya bagian organisasi dalam menjalankan tugas pengurus untuk mengakselerasi perubahan digital adalah memperkuat baik informasi pendukung di website maupun pemahaman pejabat dan

pegawai layanan masing-masing unit layanan untuk meningkatkan kualitas layanan. Layanan bersifat publik, mudah diakses dan dimengerti oleh pelanggan. Kelompok sasaran atau masyarakat menghargai manfaat yang ditawarkan. Pengguna dan layanan istimewa tertentu sering dipengaruhi oleh persyaratan yang tidak perlu, prosedur yang panjang, dan prosedur yang panjang untuk mendapatkan layanan.

Saran dan Ucapan Terimakasih

Karena teknologi berubah dengan cepat, diharapkan hal ini akan meningkatkan keterampilan digital, perencanaan, dan skalabilitas kolaborator dan karyawan. Selain itu, penting bagi para pemimpin dan mitra untuk memahami literasi digital dan menciptakan transformasi digital untuk meningkatkan layanan publik, meskipun masih muda. Menerapkan strategi perencanaan, desain, dan evaluasi untuk mengembangkan kemampuan digital mitra dan anggota sangatlah penting. Selain itu, manajemen internal harus dikembangkan untuk memahami proses dan kebutuhan mitra dan otoritas. Setelah penulisan penelitian ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada editor, teman dan kolega, reviewer dan semua orang yang membantu saya menulis penelitian dan memberi saya informasi, tekanan, saran dan kritik.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yunin, N. A. Q., Natawijaya, D., & Suhartono, S. (2022). Iptek Bagi Inovasi Daerah: Pengelolaan Gula Aren di Mandalagiri Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.30595/jppm.v6i1.6743>
- Andrias, P. K; & Sachs, Bl, P. (2021). Constructing Countervailing Power: Law & Organizing In An Era Of Political Inequality. *The Yale Law Journal*, 612–613.
- Bjuremalm, H., Gibaja, A. F., & Molleda, J. V. (2015). Akuntabilitas Demokratis Dalam Pelayanan Publik: Panduan Praktis Untuk Mengidentifikasi Perbaikan Melalui Penilaian (Vols. 33-36). *Stockholm, Sweden: International IDEA*.
- Cerra, V., & Morgan, P. J. (2022). Vol. 29, No. 1, May 2022 (Vol. 29, Issue 1). *digital-2020-global.pdf*. (n.d.).
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>
- Firmansyah, E. (2019). Penerapan Teknologi sebagai Inovasi Pendidikan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 2(1), 657–666. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/snp/article/view/5736/4117>
- Fitria, N. J. L. (2021). Pembentukan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Sebagai Upaya Menuju Good Governance Dengan Prinsip Reformasi Birokrasi. *Wacana Publik*, 15(02), 105. <https://doi.org/10.37295/wp.v15i2.62>
- Gulo, E. (2021). Inovasi IPTEK dan Mutu Pendidikan dan Berintegritas. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 523–546.
- Hartaka, M. I., & Made, N. D. A. Y. (2021). Ajaran Bhakti Marga Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Sosial. *JURNALPusat Penjaminan Mutu*, 2(1), 76.
- Hefniy, H., & Fairus, R. N. (2019). Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepegawaian. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 169–197. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v3i1.517>
- Mardatillah, A., Rosmayani, R., & Prayuda, R. (2022). Manajemen strategi: Keunggulan Bersaing Berkelanjutan Berbasis Indigenous Product Creativity.
- Nabila, H., Rosilawati, I., Kadaritna, N., Lampung, F. U., Prof, J., & Brojonegoro, S. (2018). Efektivitas Problem Solving Materi Asam Basa

- dalam Meningkatkan HOTS Ditinjau dari Kemampuan Akademik. *JPKK FKIP Unila Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Kimia*, 7(2), 1-15.
- Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 13–23. <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2864>
- Packer, M. R., Parker, J. A., Chung, J. K., Li, Z., Lee, Y. K., Cookis, T., ... & Mattos, C. (2021). Raf promotes dimerization of the Ras G-domain with increased allosteric connections. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(10), e2015648118.
- Rahayu, R., Iskandar, S., & Abidin, Y. (2022). Inovasi Pembelajaran Abad 21 dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 2099–2104. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i2.2082>
- Riset, M., & Tinggi, D. A. N. P. (2018). Pendidikan Tinggi Berkualitas: “Mendorong Kemajuan IPTEK, Inovasi, dan Daya Saing Bangsa di Era Revolusi Industri 4.0.” 1–10. http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/5298/OrasiDiesUNPAR63_2018_Moh.Nasir_Pendidikantinggi_berkualitas-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Salam, A., & Sutaryo, S. (2019). Kesesuaian Sistem Pelaporan Keuangan Akrual dalam Pengambilan Keputusan Internal di Pemerintah Daerah. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.25273/jap.v8i1.4087>
- Taufiqurokhman, T., S. Sos, and M. S. (2016). *Manajemen Strategik* (Prof. Dr. Moestopo Beragama (Ed.)). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas.
- Ulumiyah, N. H. (2018). Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Dengan Penerapan Upaya Keselamatan Pasien Di Puskesmas. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 6(2), 149. <https://doi.org/10.20473/jaki.v6i2.2018.149-155>
- Watts, G. (2018). Robert Gabriel Newman. *The Lancet*, 392(10152), 1008. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(18\)32292-x](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(18)32292-x)